



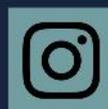
Laporan Kinerja 2020



BappedaLampung



@bappeda.lpg



bappeda_lampung

www.bappeda.lampungprov.go.id

Kata Pengantar

Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala yang telah mencurahkan rahmat dan nikmat-nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja tahun 2020 pada unit kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Laporan Kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2020 merupakan informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2020. Laporan ini selain untuk memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 juga dapat menjadi sumber informasi yang cukup untuk penyusunan evaluasi dan pencapaian rencana kerja tahun selanjutnya.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai tolok ukur perbaikan kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung dimasa yang akan datang. Akhir kata, saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Laporan Kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung tahun 2020.



KEPALA BAPPEDA,

Ir. MULYADI IRSAN, M.T

Bina Utama Madya

NIP. 19670517 199303 1 011

Ringkasan Eksekutif

Sesuai dengan DPA tahun 2020, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 58 tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Lampung T.A 2020, alokasi anggaran BAPPEDA Provinsi Lampung sebesar Rp. 25.038.524.140,- terdiri atas belanja langsung sebesar Rp. 12.590.979.950,- dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 12.717.544.190,-. Dengan dukungan anggaran Belanja Langsung tersebut BAPPEDA melaksanakan 10 program dan 61 kegiatan yang terbagi kedalam 2 sasaran utama dan 1 sasaran pendukung. Untuk 2 sasaran utama terdiri 6 program dan 34 kegiatan dengan total anggaran Rp. 6.492.003.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.051.415.770,- atau 77,81% dan 1 sasaran pendukung terdiri dari 4 program 27 kegiatan dengan total anggaran Rp. 6.098.976.450,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.200.143.871,-. dengan persentase antara pagu anggaran dan realisasi sebesar 85,26%.

Analisa terhadap 3 sasaran strategis BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2020, menunjukkan bahwa capaian pada 3 sasaran strategis masuk pada kategori baik. Realisasi capaian sasaran strategis BAPPEDA Provinsi Lampung tahun 2020 diuraikan sebagai berikut :

✚ Pencapaian sasaran strategis **“Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah”** dengan capaian 3 indikatornya sebagai berikut :

1. Indikator “Penetapan RKPD Tepat Waktu” dengan capaian realisasi sebesar 100 %. Indikator ini dicapai melalui penetapan RKPD Provinsi Lampung sesuai target yang ditetapkan yaitu pada Bulan Juni Tahun 2020;

2. Indikator “Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD” dengan capaian realisasi sebesar 98,16%. Indikator ini ditargetkan sebesar 30% namun realisasi capaian adalah sebesar 29,45%. Usulan stakeholder ini diakomodir dalam aplikasi E-RKPD BAPPEDA Provinsi Lampung. Yang menjadi usulan tersebut dibagi menjadi 2 bagian antara lain : 1) Usulan Masyarakat; dan 2) Usulan Pokir DPRD;
3. Indikator “Persentase Konsistensi Program/ Kegiatan RKPD dengan Program/ Kegiatan KUA PPAS” dengan realisasi sebesar 100%. Indikator ini dicapai melalui Program yang terdapat pada RKPD yaitu berjumlah 385 Program dan Kegiatan berjumlah 3.628. Adapun dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) seluruh Program dan Kegiatan konsisten dengan RKPD.

✚ Pencapaian sasaran strategis **“Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah”** dengan capaian 3 indikatornya sebagai berikut:

1. Indikator “Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD” dengan realisasi sebesar 81,25%. Indikator ini dicapai melalui indikator sasaran Renstra OPD telah selaras dengan indikator sasaran pada RPJMD 2019-2024 berjumlah 39 OPD, sedangkan yang belum selaras berjumlah 9 OPD;
2. Indikator “Persentase OPD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD” dengan realisasi sebesar 81,25%. Indikator ini dicapai melalui indikator sasaran Renja OPD telah selaras dengan indikator sasaran pada RKPD berjumlah 39 OPD. Adapun jumlah indikator yang tertera

dalam RKPD Provinsi Lampung Tahun 2020 berjumlah 33 yang diturunkan kedalam indikator sasaran yang terdapat pada Renja di masing-masing OPD;

3. Indikator “Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai” dengan realisasi sebesar 51,85% sampai dengan Bulan April tahun 2021. Indikator ini dicapai melalui indikator yang telah mencapai target berjumlah 14 Indikator dari target yang ditetapkan sebesar 80% atau sebanyak 27 indikator dari 33 indikator yang ditargetkan mencapai 100%.

✚ Pencapaian sasaran pendukung ” **Meningkatnya kapasitas dan kinerja instansi BAPPEDA** “ dengan capaian 1 indikatornya sebagai berikut:

1. Indikator “Nilai Sakip BAPPEDA” dengan realisasi sebesar 100%. Indikator ini dicapai melalui penyediaan sarana dan prasarana rutin kantor, persentase kehadiran pegawai BAPPEDA dalam 1 tahun, Penyusunan laporan perencanaan, evaluasi, keuangan serta asset. Target indikator ini merupakan nilai SAKIP yang ingin dicapai pada tahun 2019 yaitu predikat “BB” karena hasil predikat tersebut akan didapat melalui Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari Inspektorat yang diberikan ke masing-masing OPD pada Bulan Juli Tahun 2020.

Disamping beberapa capaian kinerja tersebut, masih terdapat kendala dan permasalahan dalam peningkatan kinerja BAPPEDA. Permasalahan itu adalah :

✚ Pada aspek perencanaan kegiatan, meskipun pengelola kegiatan telah menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), serta Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dan Rencana Arus Kas (RAK) ; namun kondisi lingkungan eksternal di masa pandemic Covid-19 yang telah menghadirkan kebijakan dan

regulasi yang ditempuh oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang harus dipatuhi oleh perangkat daerah dan pelaksana kegiatan. Secara langsung maupun tidak langsung, hal tersebut berdampak pada munculnya “keterbatasan” teknis operasional pelaksanaan kegiatan bagi pengelola kegiatan;

- ✚ Pada aspek pelaksanaan, terdapat beberapa kegiatan yang mengalami keterlambatan *schedule* dalam pelaksanaannya. Hal tersebut sebagai dampak adanya sikap *wait and see* dari pengelola kegiatan, seiring dengan dinamika yang berkembang ditengah pandemic Covid-19, dimana aspek kesehatan menjadi pertimbangan yang utama.
- ✚ Memperhatikan kebijakan *refocussing* dan realokasi anggaran (=rasionalisasi anggaran) yang ditempuh oleh pemerintah di masa pandemic, maka terdapat beberapa kegiatan yang mengalami penyesuaian (=mengurangi) jumlah *output*, yang secara logis akan berpengaruh terhadap capaian dari target *output* yang telah ditetapkan.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga diharapkan bermanfaat untuk sebagai dasar perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun yang akan datang.

Telukbetung, Maret 2021



Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel dan Daftar Gambar	vii
Bab I. Pendahuluan	1
1.1 Dasar Hukum.....	2
1.2 Tugas dan Fungsi	3
1.3 Struktur Organisasi.....	4
1.4 Sumber Daya Manusia.....	7
1.5 Sarana dan Prasarana.....	9
1.6 Sumber Pendanaan.....	11
1.7 Sistematis Laporan Kinerja.....	12
Bab II. Perencanaan Kinerja	14
2.1 Renstra Bappeda 2019-2024.....	13
2.2 Alokasi Anggaran Tahun 2020.....	22
2.3 Instrumen Pendukung.....	23
Bab III. Akuntabilitas Kinerja	27
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja.....	27
3.2 Capaian IKU pada Renstra BAPPEDA 2019-2024.....	28
3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Renstra 2019-2024.....	30
3.4 Akuntabilitas Keuangan dan Realisasi Tahun 2020.....	37
3.5 Prestasi BAPPEDA yang diraih selama Tahun 2020.....	48
Bab IV. Penutup	49
4.1 Kesimpulan.....	49
4.2 Rekomendasi hasil Evaluasi Program/ Kegiatan.....	49
Lampiran	

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin.....	8
Tabel 1.2	Sarana dan Prasarana Pendukung di BAPPEDA.....	10
Tabel 1.3	Anggaran Belanja BAPPEDA Tahun 2020.....	11
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator BAPPEDA 2019-2024.....	17
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama BAPPEDA Tahun 2019-2024...	18
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020.....	20
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	28
Tabel 3.2	Capaian IKU BAPPEDA Tahun 2020.....	29
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja BAPPEDA Tahun 2020.....	30
Tabel 3.4	Pagu dan Realisasi Anggaran BAPPEDA Tahun 2020..	39

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Struktur Organisasi BAPPEDA.....	6
Gambar 1.2	Sarana dan Prasarana.....	9
Gambar 2.1	Cascading Misi RPJMD s/d Renstra BAPPEDA.....	16
Gambar 2.2	Pohon Kinerja BAPPEDA.....	21
Gambar 2.3	Alokasi Anggaran BAPPEDA Tahun 2020.....	23
Gambar 2.4	Website BAPPEDA.....	24
Gambar 2.5	Website E-RKPD BAPPEDA Provinsi Lampung.....	25
Gambar 2.6	Website Simonev BAPPEDA Provinsi Lampung.....	25
Gambar 2.7	Website Geoportal Lampung.....	26
Gambar 2.8	Layanan Media Sosial BAPPEDA Provinsi Lampung..	26
Gambar 3.1	Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2020.....	38

Bab I. Pendahuluan

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik.

Bab I. Berisi :

1. Dasar Hukum
2. Tugas dan Fungsi;
3. Struktur Organisasi;
4. Sumber Daya Manusia;
5. Sarana dan Prasarana;
6. Sumber Pendanaan
7. Sistematika LKj

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, BAPPEDA sebagai unsur Penunjang Urusan Perencanaan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi BAPPEDA sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

1.1 Dasar Hukum

Laporan Kinerja BAPPEDA Tahun 2020 ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja an Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Prov Lampung; dan
7. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Perangkat Daerah yang terintegrasi dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Prov Lampung di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;
10. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/770/ B.09/ HK/ 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, BAPPEDA Provinsi Lampung mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, BAPPEDA mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggara penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. Penyelenggara perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah;
- c. Penyelenggara pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan serta pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan;
- e. Penyelenggaraan administrasi;
- f. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan;
- g. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

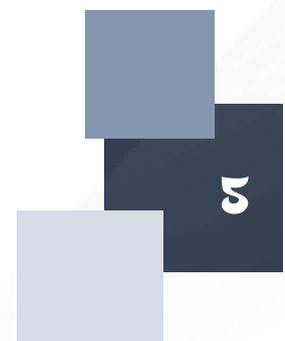
1.3 Struktur Organisasi

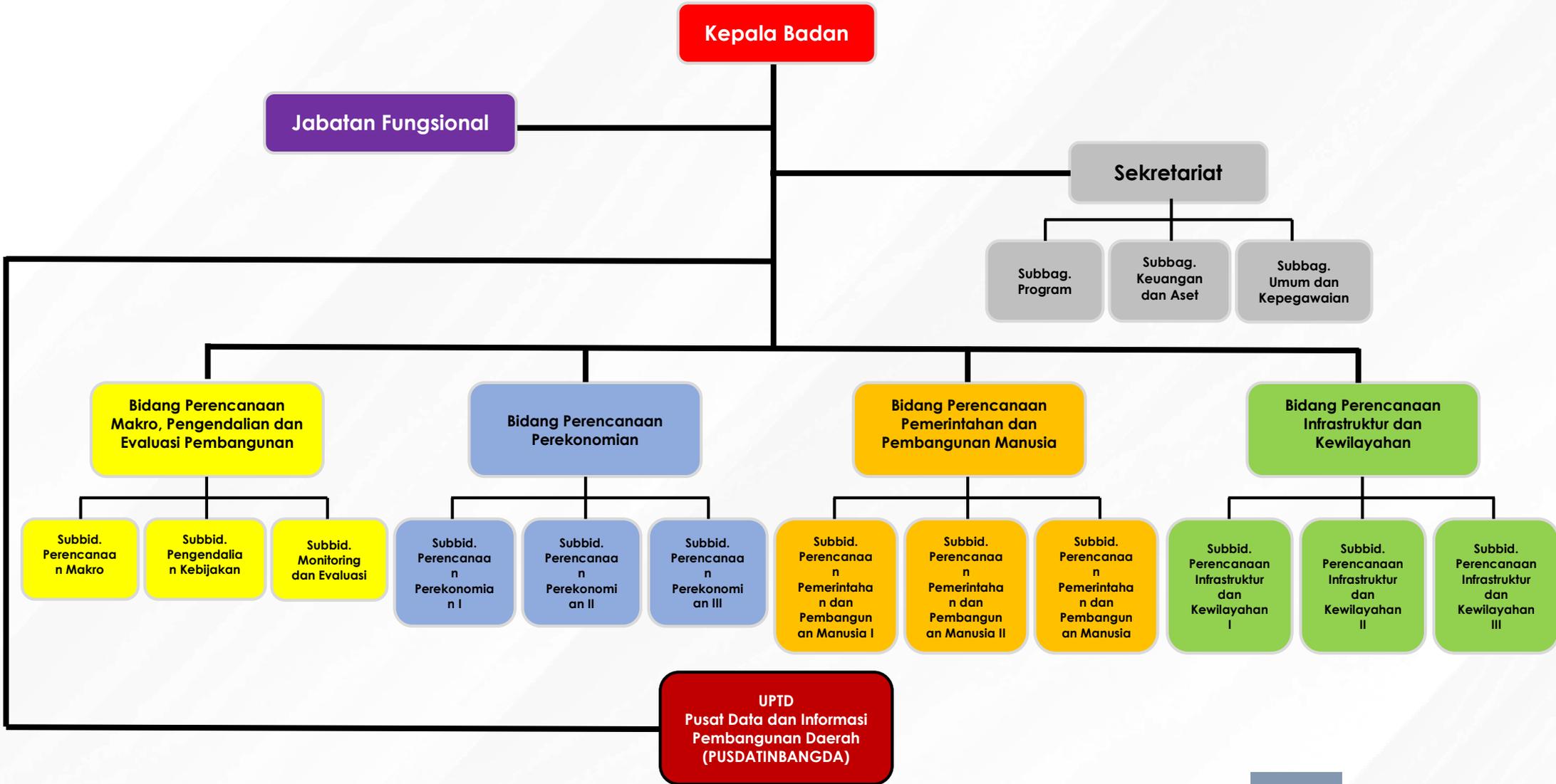
BAPPEDA Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, maka BAPPEDA merupakan unsur pelaksana penunjang pemerintahan daerah bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah, dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. BAPPEDA Provinsi Lampung terdiri dari:

1. Sekretariat, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan terdiri dari Sub Bagian Program, Sub Bagian Keuangan dan Aset, serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan terdiri dari Subbid. Perencanaan Makro, Subbid. Pengendalian Kebijakan dan Subbid. Monitoring dan Evaluasi;
3. Bidang Perencanaan Perekonomian terdiri dari Subbid. Perencanaan Perekonomian I, Subbid. Perencanaan Perekonomian II, Subbid. Perencanaan Perekonomian III.;
4. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari Subbid. Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I, Subbid. Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II, Subbid. Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III;
5. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri dari Subbid. Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan I, Subbid. Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan II, Subbid. Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan III;
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah (Pusdatimbangda) terdiri dari Subbag. Tata

Usaha, Seksi Pengelolaan Data Spasial, Seksi Pengelolaan Data A-Spasial.

Secara lengkap struktur organisasi BAPPEDA berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 sebagaimana gambar di bawah ini :





Gambar 1.1 Struktur Organisasi BAPPEDA Berdasarkan Pergub 56 Tahun 2019

1.4 Sumber Daya Manusia

Sumberdaya aparatur merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Berdasarkan Bagan Struktur Organisasi BAPPEDA Provinsi Lampung terdiri dari 25 Jabatan Struktural, yaitu :

- a. Satu orang Kepala Badan, eselon II.a;
- b. Satu orang Sekretaris, eselon III.a;
- c. Empat orang Kepala Bidang, eselon III.a;
- d. Satu orang Kepala UPTD, eselon III.a;
- e. Delapan Belas orang Kepala Sub Bagian/Sub Bidang, eselon IV.a

Adapun komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan BAPPEDA Provinsi Lampung berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagaimana berikut :



Berdasarkan diagram disamping ASN Bappeda pada bulan Desember tahun 2020 berjumlah 117 orang dengan kualifikasi jenjang pendidikan Strata II sebanyak 46 orang (39,32 %), Strata I dengan jumlah ASN 43 orang (36,75 %), Diploma IV sebanyak 5 orang (4,27 %), Diploma III sejumlah 4 orang (3,42 %), SLTA 18 orang (15%), dan SD 1 orang (0,85 %)

Ditinjau dari jenjang kepangkatan dan golongan, komposisi ASN di lingkungan Bappeda Provinsi Lampung, yang terbanyak adalah Golongan III, diikuti dengan Golongan IV, Golongan II

dan Golongan I dengan rincian sebagaimana pada Diagram berikut . Dari jumlah 117 orang, Golongan III berjumlah 81 orang atau persentase 69,23 % dengan rincian Golongan III.d berjumlah 18 orang, Golongan III.c sebanyak 33 orang, Golongan III. b sebanyak 23 orang, dan Golongan III. A sebanyak 7 orang.



Sedangkan Golongan IV berjumlah 25 orang atau persentase 21,37 % dengan rincian Golongan IV.d berjumlah 2 orang, Golongan IV.b sebanyak 5 orang, dan Golongan IV.a sebanyak 18 orang.

Untuk Golongan II berjumlah 10 orang atau persentase 8,55% dengan rincian Golongan II d berjumlah 2 orang, Golongan II c 3 orang, Golongan II b 5 orang. Serta Golongan I berjumlah 1 orang atau persentase 0,85 % dengan rincian Golongan I d berjumlah 1 orang.

Sampai dengan Desember 2020, aparatur Bappeda Provinsi Lampung tercatat berjumlah 117 orang yang terdiri dari 25 orang pejabat struktural, 5 orang pejabat fungsional perencana, dan 87 orang pelaksana. Kondisi kepegawaian secara umum dikelompokkan berdasarkan jenis jabatan dan jenis kelamin sebagai berikut :

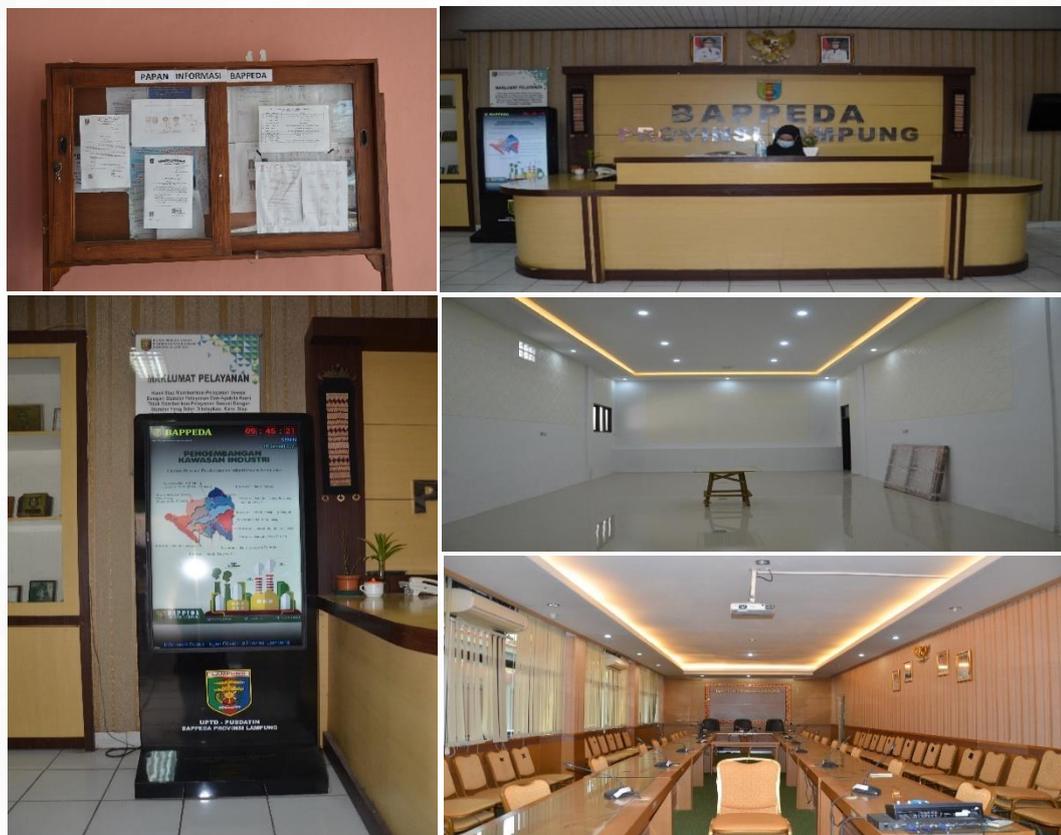
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin

Nama Pejabat	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Pejabat Struktural	13	12	25
Pejabat Fungsional Perencanaan	2	3	5
Fungsional Umum/Pelaksana	48	39	87
TOTAL	63	54	117
PERSENTASE	54%	46%	100

1.5 Sarana dan Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Bappeda Provinsi Lampung sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja, walaupun masih perlu ditingkatkan agar tugas-tugas dapat berjalan lebih cepat dan profesional.

Sarana dan prasarana tersebut secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Bappeda sekaligus menunjang kinerja Bappeda Provinsi Lampung. Walaupun demikian, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penyusutan/tidak lagi berfungsi secara optimal sehingga mampu meningkatkan kinerja Bappeda Provinsi Lampung.



Gambar 1.2 Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan di Bappeda

Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana Pendukung di Bappeda

NO	NAMA/JENIS BARANG	MERK/TYPE	TAHUN	JUMLAH
1.	Gedung Kantor 3 Lt	-	-	-
2.	Ruang Rapat			
	- Ruang Rapat Lt. 1	-	-	1 Ruang
	- Ruang Rapat Lt. 1	-	-	1 Ruang
	- Ruang Rapat Lt. 3	-	-	1 Ruang
	- Ruang Rapat Kecil	-	-	6 Ruang
3.	Perpustakaan	-	-	1 Ruang
4.	Kendaraan Roda 4			
	- Fortuner	Toyota	2020	1 unit
	- Hi Lux	Toyota	2015	1 unit
	- Minibus/Rust	Toyota	2014	1 unit
	- Minibus/Avanza	Toyota	2014	1 unit
	- Minibus/Avanza	Toyota	2014	1 unit
	- Minibus/Avanza	Toyota	2004	1 unit
	- Minibus/Avanza	Toyota	2004	1 unit
	- Suzuki APV	Suzuki	2007	1 unit
5.	Kendaraan Roda 2			
	- Sepeda Motor	- Yamaha MX	2014	1 unit
	- Sepeda Motor	- Honda C. 100	1996	1 unit
	- Sepeda Motor	- Honda NF125 SD	2006	1 unit
	- Sepeda Motor	- Honda MCB	1997	1 unit
	- Sepeda Motor	- Honda GL MAX	1997	1 unit
	- Sepeda Motor	- Suzuki	2005	1 unit
	- Sepeda Motor	- Honda NF125 SD	2006	1 unit
	- Sepeda Motor	- Honda C.86	1996	1 unit
	- Sepeda Motor	- Yamaha RX-S	1996	1 unit
	- Sepeda Motor	- Honda C. 100	2002	1 unit
6.	Sarana Pendukung			
	- Komputer	Berbagai merk dan type		66 unit
	- Note Book	Berbagai merk dan type		51 unit
	- Printer	Berbagai merk dan type		70 unit
	- Camera	Berbagai merk dan type		15 unit
	- Handycam	Berbagai merk dan type		8 unit
	- LCD	Berbagai merk dan type		10 unit
	- Televisi	Berbagai merk dan type		20 unit
	- Sound System	Berbagai merk dan type		5 unit

NO	NAMA/JENIS BARANG	MERK/TYPE	TAHUN	JUMLAH
	- Wireless	Bermacam merk dan type		5 unit
	- Scanner	Bermacam merk dan type		6 unit
	- AC	Bermacam merk dan type		51 unit
	- GPS	Bermacam merk dan type		3 unit
	- Spinning Bike			1 unit
	- Treadmill			1 unit
	- Sit Up Bench			1 unit
	- Power Rider			1 unit
	- Tablet Note	Bermacam merk dan type		8 unit
	- Lemari Es	Bermacam merk dan type		unit

1.6 Sumber Pendanaan

Pada tahun anggaran 2020, sumber dana untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda berasal dari APBD Provinsi Lampung dan APBN dengan uraian sebagai berikut :

- Berdasarkan Perda Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung T.A. 2020 dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 58 tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Lampung T.A 2020, alokasi anggaran BAPPEDA Provinsi Lampung sebesar Rp. 25.038.524.140,- terdiri atas belanja langsung sebesar Rp. 12.590.979.950,-
- Alokasi dana APBN sebesar Rp. 555.717.000

Tabel 1.3 Anggaran Belanja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2020

Sumber Dana	Besar Anggaran (Rp)	Persentase (%)
APBD	25.038.524.140	96,81
- Belanja Langsung	12.590.979.950	
APBN	555.717.000	3,19
Total	25.864.241.140	100

1.7 Sistematika Laporan Kinerja

Sistematika penulisan Laporan Kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung tahun 2020 adalah sebagai berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang latar belakang penyusunan LKj, Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi BAPPEDA Provinsi Lampung, keadaan pegawai, sarana dan prasarana, keuangan, serta Sistematika penulisan LKj.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja untuk Tahun 2019-2024. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama BAPPEDA pada tahun 2020 serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan,

termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan rekomendasi dan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan.

Bab II. Perencanaan Kinerja

2.1 Renstra BAPPEDA 2019-2024

Rencana Strategis BAPPEDA Provinsi Lampung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada visi dan misi kepala daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Rencana Strategis BAPPEDA Provinsi Lampung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Gubernur Lampung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa rencana strategis BAPPEDA Provinsi Lampung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

A. Visi dan Misi

Visi Provinsi Lampung berdasarkan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 yaitu :



Memperhatikan Visi pembangunan tersebut, diharapkan Masyarakat Lampung menjadi "subyek utama" dalam pembangunan

Bab II. Berisi :

1. Penjelasan Visi Misi KDH 2019-2024;
2. Tujuan, Sasaran, Indikator;
3. Penjelasan IKU BAPPEDA 2019-2024;
4. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020;
5. Rencana Anggaran;
6. Instrumen Pendukung

daerah dan dalam membangun kesejahteraannya. Pembangunan dapat terwujud jika didukung adanya rasa aman dan tentram bagi masyarakat dan investor, didukung oleh sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata.

Dalam rangka mencapai visi "**Rakyat Lampung Berjaya**" tersebut, maka disusunlah misi sebagai bentuk penjabaran Visi yang dicita-citakan. Selanjutnya misi Provinsi Lampung dirumuskan sebagai berikut :

6 Misi

Untuk Provinsi Lampung 2019-2024

Gubernur Arinal menyampaikan 6 misi untuk Provinsi Lampung dalam 5 Tahun kedepan. Keenam Misi ini diharapkan mendorong Provinsi Lampung dapat tumbuh menjadi daerah yang maju dengan masyarakatnya yang cerdas (berbudaya) dan berdaya saing sehingga kesejahteraan dan kemakmuran bersama dapat tercapai.



B. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja BAPPEDA

Mengacu pada Visi Misi tersebut, BAPPEDA sebagai unsur Penunjang Pemerintahan urusan Perencanaan mendukung pencapaian Misi ke- 2 yaitu **“Mewujudkan “good governance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik”** dengan Sasaran RPJMD yaitu **“Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah”**.



Gambar 2.1 Cascading Misi RPJMD s/d Sasaran BAPPEDA

Tujuan yang ditetapkan oleh BAPPEDA Provinsi Lampung untuk mencapai visi misi Provinsi Lampung ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator BAPPEDA 2019-2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
Misi ke- 2: "Mewujudkan "good governance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik"								
1.	Mewujudkan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas (menjawab permasalahan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah).	Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah.	Penetapan RKPD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
			Persentase Usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD;	30%	30%	30%	31%	32%
			Persentase Konsistensi Program/ Kegiatan RKPD dengan Program/ Kegiatan KUA PPAS.	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD;	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase OPD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPDP;	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai.	80%	85%	90%	95%	95%

C. Indikator Kinerja Utama BAPPEDA Tahun 2019-2024

Pada RPJMD 2019-2024, BAPPEDA telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Kepala BAPPEDA untuk periode 2019-2024. IKU tersebutlah yang menjadi panduan BAPPEDA dalam mencapai target per tahun berkenaan. IKU dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama BAPPEDA 2019-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah;	Waktu Penetapan RKP	Tepat Waktu	Ketepatan waktu dalam penyusunan RKP.	Dihitung berdasarkan Waktu Penetapan RKP Maksimal 1 minggu setelah RKP ditetapkan	Pegub tentang RKP setiap tahun
		Persentase Usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKP;	%	Usulan dari Stakeholder yang menjadi salah satu point penting dalam penyusunan RKP yang diakomodir.	Dihitung berdasarkan Usulan Stakeholder sesuai dengan kewenangan yang diakomodir dibagi Jumlah seluruh Usulan Stakeholder yang sesuai kewenangan dikali 100 Persen.	Berita Acara Desk Musrenbang RKP
		Persentase Konsistensi Program/ Kegiatan RKP dengan Program/ Kegiatan KUA PPAS.	%	KUA-PPAS merupakan dokumen penganggaran yang penyusunannya harus berpedoman kepada RKP sebagai dokumen perencanaan tahunan. Maka konsistensi antara program pada KUA-PPAS dengan program pada RKP menjadi sangat penting.	Dihitung berdasarkan Jumlah OPD yang memiliki Indikator Renstranya selaras dengan RPJMD dibagi Jumlah OPD lingkup Provinsi Lampung dikali 100 Persen.	1. Renstra OPD dan Perda RPJMD; 2. Peraturan Gubernur tentang RKP Provinsi Lampung; 3. KUA/ PPAS Provinsi Lampung
2.	Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring	Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras	%	Indikator sasaran renstra OPD harus selaras dengan indikator Sasaran RPJMD	Dihitung berdasarkan Jumlah OPD yang memiliki Indikator sasaran Renstranya selaras	Renstra OPD dan Perda RPJMD

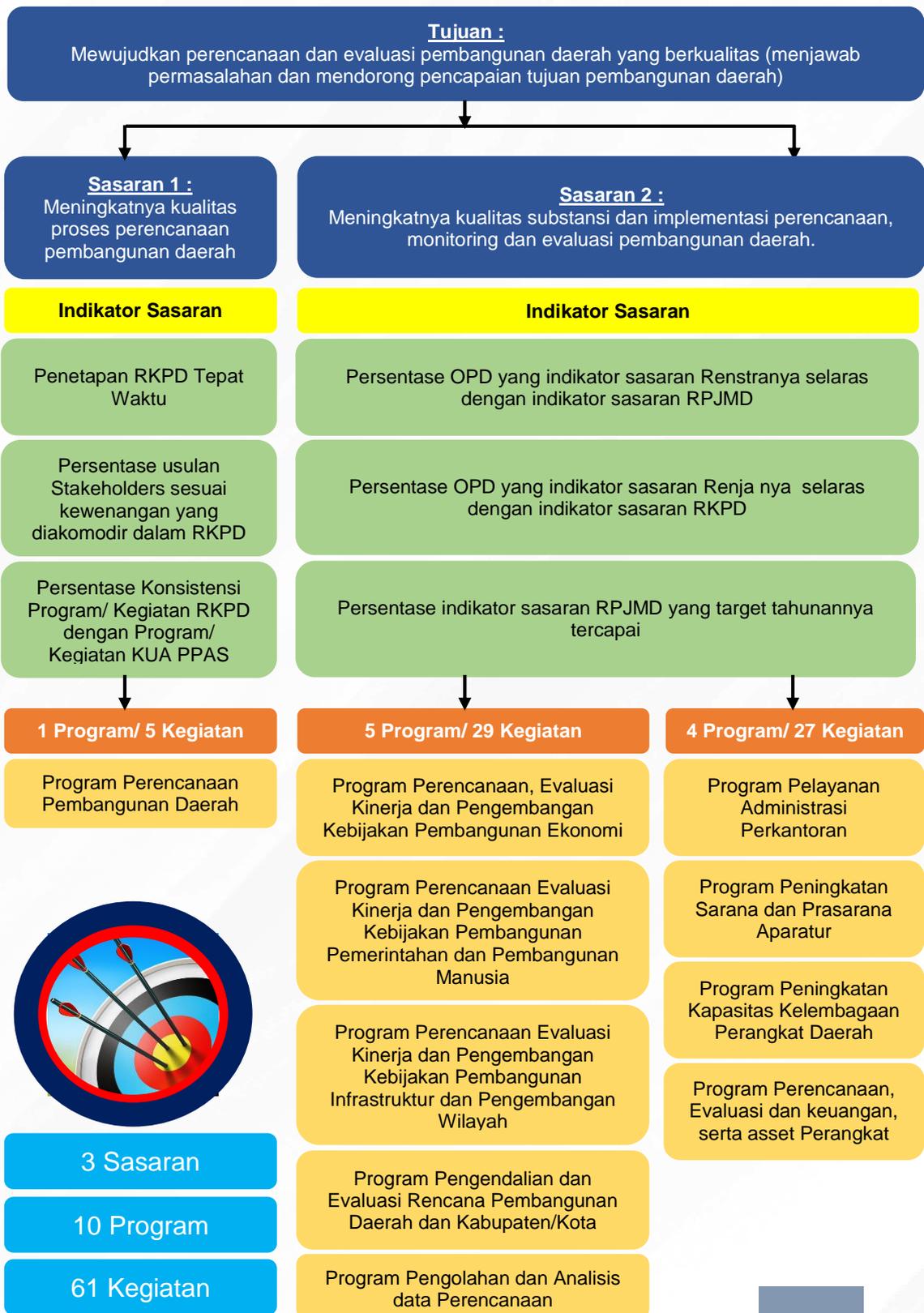
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
	dan evaluasi pembangunan daerah.	dengan indikator sasaran RPJMD;		agar capaian kinerja KDH dapat terpenuhi	dengan Indikator sasaran RPJMD dibagi Jumlah OPD lingkup Provinsi Lampung dikali 100 Persen.	
		Persentase OPD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPd;	%	Indikator sasaran renja OPD harus selaras dengan indikator Sasaran RKPd agar capaian kinerja melalui Perjanjian Kinerja Kepala OPD dapat terpenuhi	Dihitung berdasarkan Jumlah Program/ Kegiatan RKPd yang masuk dalam KUA PPAS dibagi Jumlah seluruh Program/Kegiatan KUA PPAS dikali 100 Persen.	Pergub RKPd dan Renja OPD
		Persentase target indikator sasaran RPJMD yang tercapai.	%	Target dan kebijakan yang dimuat dalam RPJMD memerlukan analisis kebijakan yang implementatif dan parsial guna mencapai target-target yang disusun harus berorientasi pada manfaat yang diperoleh dari analisis tersebut	Dihitung berdasarkan Jumlah Indikator sasaran RPJMD yang tercapai dibagi Jumlah seluruh Indikator RPJMD dikali 100 Persen	1. Perda RPJMD; 2. Capaian evaluasi hasil RKPd Provinsi Lampung.

D. Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2020

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja Perubahan BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2020:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah;	Waktu Penetapan RKPD	Tepat Waktu (100%)
		Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD;	30
		Persentase Konsistensi Program/ Kegiatan RKPD dengan Program/ Kegiatan KUA PPAS.	100
2	Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD;	100
		Persentase OPD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD;	100
		Persentase target indikator sasaran RPJMD yang tercapai.	80



Gambar 2.2 Pohon Kinerja BAPPEDA

2.2 Alokasi Anggaran Tahun 2020

Dalam rangka mendukung capaian kinerja yang telah ditetapkan, pada tahun 2020 Bappeda melaksanakan **10 Program** dan **61 Kegiatan**, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 Tentang APBD Provinsi Lampung T.A. 2020, dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Penjabaran APBD Provinsi Lampung T.A. 2020 alokasi anggaran Belanja Langsung BAPPEDA Provinsi Lampung adalah sebesar **Rp. 20.815.921.000,- (Dua Puluh Miliar Delapan Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)** yang terdiri dari :

Selanjutnya, dengan memperhatikan :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 2 April 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD T.A. 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Lebih lanjut, dengan telah ditetapkan Perda Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020, Bappeda melaksanakan **10 Program** dan **61 Kegiatan** telah ditetapkan alokasi anggaran **Belanja Langsung (BL)** sebesar Rp. 12.590.979.950,-. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 2.3 Alokasi Anggaran BAPPEDA Tahun 2020

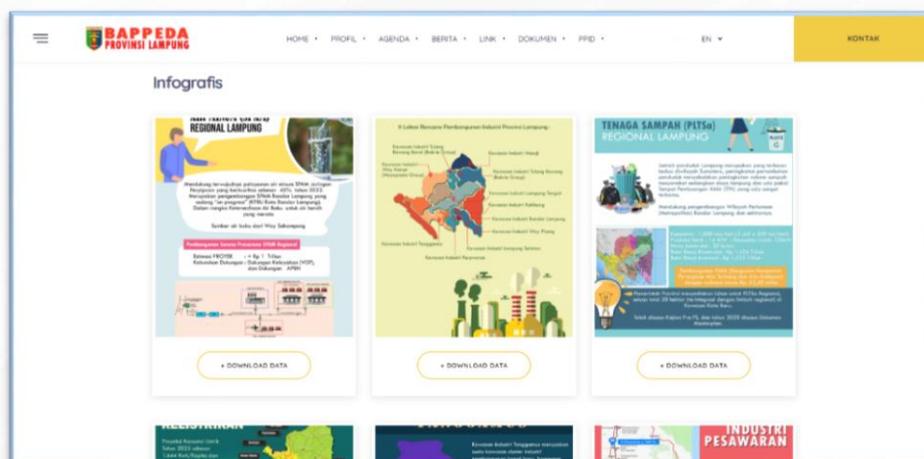
2.3 Instrumen Pendukung

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Provinsi Lampung. BAPPEDA Provinsi Lampung selalu berbenah untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya.

Dalam konteks pengembangan informasi tersebut BAPPEDA Provinsi Lampung membangun beberapa sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung baik dalam hal meningkatkan kapasitas BAPPEDA Provinsi Lampung sebagai institusi perencanaan di daerah maupun dalam memberikan layanan kepada stakeholder.

a. Website BAPPEDA

BAPPEDA mempunyai wadah informasi berupa Website yang dapat diakses di alamat www.bappeda.lampungprov.go.id. Website ini memberikan informasi berupa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan BAPPEDA. Melalui website ini pula BAPPEDA memberikan ruang kepada OPD untuk dapat konsultasi melalui bar **“Klinik Perencanaan”**, serta website ini terintegrasi dengan PPID BAPPEDA terkait keterbukaan informasi dan Perpustakaan BAPPEDA untuk mengetahui buku-buku baru atau pun buku yang berada di BAPPEDA saat ini.



Gambar 2.4 Website BAPPEDA Provinsi Lampung

b. Sistem Informasi Perencanaan (E-RKPD)

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah agar lebih transparan dan efektif dan efisien, mulai tahun 2019 Pemerintah Provinsi Lampung melalui BAPPEDA membuat sebuah aplikasi E-Planning dan dapat diakses dapat diakses menggunakan

d. Sistem Informasi Geoportal Lampung

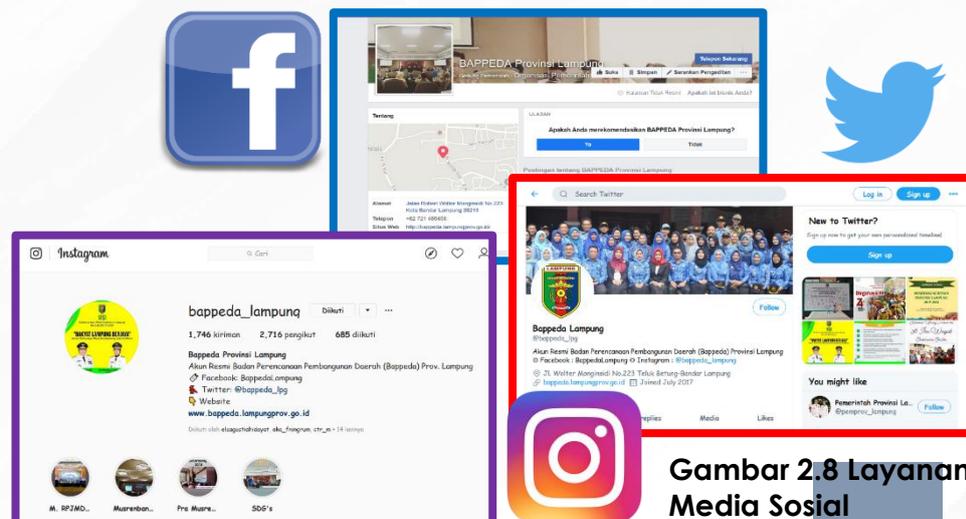
Sistem Informasi Geoportal Lampung berfungsi untuk memberikan informasi data spasial daerah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Lampung secara umum sesuai dengan arah kebijakan Badan Informasi Geospasial. Sistem ini juga berfungsi sebagai media untuk berbagi data spasial antar pengguna sistem.



Gambar 2.7 Website Geoportal Lampung

e. Layanan Informasi Media Sosial

Pada Tahun 2020 BAPPEDA telah memiliki layanan informasi melalui 3 aplikasi yang sedang banyak digunakan oleh khalayak ramai untuk mempermudah. 3 aplikasi tersebut adalah Facebook, Twitter, dan Instagram.



Gambar 2.8 Layanan Media Sosial

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Bab III. Berisi :

1. Kerangka Pengukuran;
2. Capaian IKU 2019-2024;
3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis;
4. Akuntabilitas Keuangan Pagu dan Realisasi Keuangan Tahun 2020;
5. Prestasi BAPPEDA yang Diraih Selama Tahun 2020.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Capaian 6 (enam) indikator kinerja utama (IKU) dan 1 (satu) indikator kinerja pendukung, diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian 3 (tiga) kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode Warna
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi	Blue
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi	Green
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang	Magenta
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah	Yellow
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah	Red

3.2 Capaian IKU pada Renstra 2019-2024

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian, kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lampung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Lampung tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian IKU BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN	REALISASI TINGKAT CAPAIAN	%	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SASARAN UTAMA						
I	Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah;	Penetapan RKPD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	Penetapan RKPD sesuai target yang ditetapkan.
		Persentase Usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD;	30%	29,45%	98,16 %	Memperhatikan keselarasan dengan prioritas daerah dan kemampuan keuangan daerah
		Persentase Konsistensi Program/ Kegiatan RKPD dengan Program/ Kegiatan KUA PPAS;	100%	100%	100%	Target telah tercapai dimana program/kegiatan KUA-PPAS yang telah konsisten terhadap program/kegiatan dalam RKPD 2021
II	Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD;	100 %	81,25%	81,25 %	Capaian kinerja diukur berdasarkan hasil evaluasi oleh Kemenpan dan RB RI. Dalam hasil evaluasi tersebut terdapat 9 OPD yang belum selaras indikator Renstranya terhadap RPJMD.
		Persentase OPD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD;	100 %	81,25%	81,25 %	Capaian kinerja diukur berdasarkan hasil evaluasi oleh Kemenpan dan RB RI. Dalam hasil evaluasi tersebut terdapat 9 OPD yang belum selaras indikator Renjanya terhadap RKPD 2021.
		Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai.	80%	51,85%	64,81 %	Pengukuran terhadap capaian 27 indikator sasaran RPJMD (80%). Hasilnya sampai dengan Bulan April Tahun 2021 terdapat 14 indikator yang telah mencapai target yang direncanakan.

Dari 6 indikator kinerja utama yang telah ditetapkan oleh BAPPEDA Provinsi Lampung, kinerja yang telah mencapai 100% sebanyak 2 indikator, 3 indikator lainnya masing-masing mencapai nilai 98,16% dan 81,25%, serta 1 indikator dengan capaian 57,68%.

3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Renstra 2019-2024

Secara umum BAPPEDA Provinsi Lampung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2024 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020. Jumlah Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 sebanyak 7 (tujuh) indikator sasaran.

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja BAPPEDA Tahun 2020

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Penetapan RKPD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100
2.	Persentase Usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD;	%	30	29,45	98,16
3.	Persentase Konsistensi Program/ Kegiatan RKPD dengan Program/ Kegiatan KUA PPAS;	%	100	100	100
4.	Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD;	%	100	81,25	81,25
5.	Persentase OPD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD;	%	100	81,25	81,25
6.	Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai.	%	80	51,85	64,81

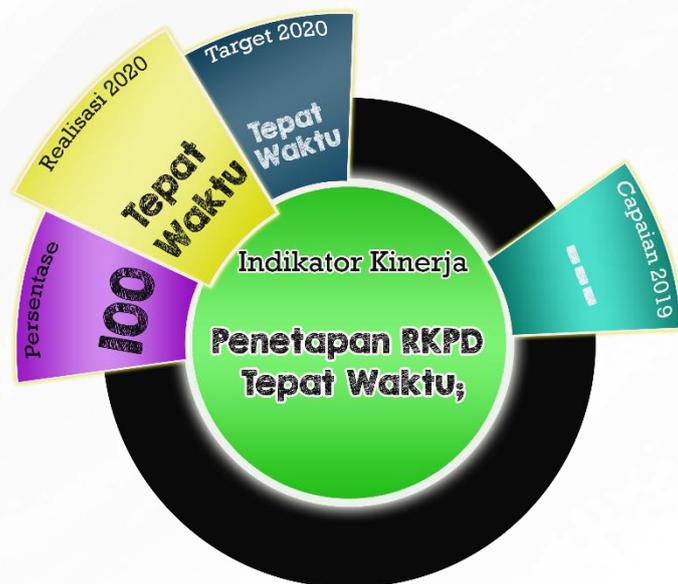
Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2020 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 2 sasaran dan sebanyak 6 indikator kinerja, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra BAPPEDA Provinsi Lampung tahun 2019-2024, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

1. Sasaran Utama 1 : Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah

Proses perencanaan Pembangunan Provinsi Lampung yang telah dilakukan meliputi : Forum Gabungan SKPD Provinsi, Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten dan Kota, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi, dan Koordinasi Regional pembangunan se-wilayah Sumatera. Indikator kinerja sasaran 1 ini terdapat 3 indikator sasaran yaitu :

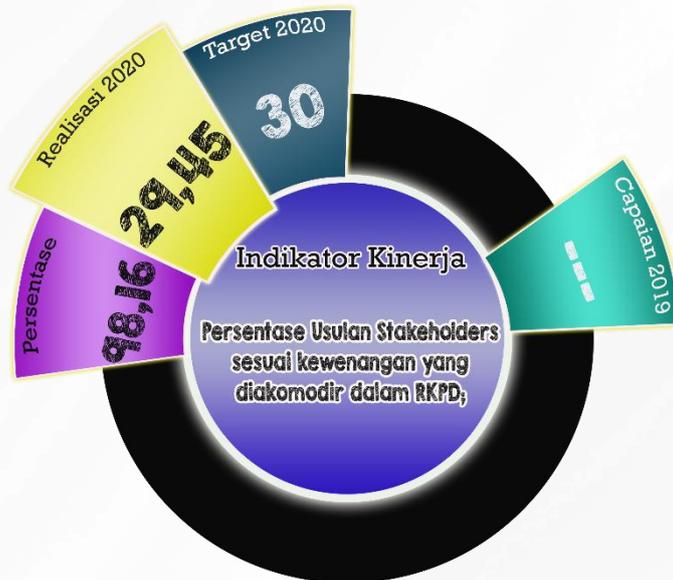
1. Penetapan RKPD Tepat Waktu dengan target kinerja adalah tepat waktu;
2. Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD dengan target kinerja sebesar 30%;
3. Persentase Konsistensi Program/ Kegiatan RKPD dengan Program/ Kegiatan KUA PPAS dengan target kinerja sebesar 100%.

Indikator sasaran 1.a adalah Penetapan RKPD Tepat Waktu dengan target kinerja adalah tepat waktu. Indikator ini dicapai melalui penetapan RKPD Provinsi Lampung sesuai target yang ditetapkan yaitu pada Bulan Juni Tahun 2020.



Indikator sasaran 1.b

adalah Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD dengan target kinerja sebesar 30%. Adapun realisasinya adalah sebesar 29,45 % atau dengan persentase terhadap target sebesar 98,16%.



Usulan stakeholder ini diakomodir dalam aplikasi E-RKPD BAPPEDA Provinsi Lampung. Yang menjadi usulan tersebut dibagi menjadi 2 bagian antara lain : 1) Usulan Masyarakat; dan 2) Usulan Pokir DPRD



Indikator 1.c adalah Persentase Konsistensi Program/ Kegiatan RKPD dengan Program/ Kegiatan KUA PPAS dengan target kinerja sebesar 100%. Pada tahun 2020 Program yang terdapat pada RKPD yaitu berjumlah 385 Program dan Kegiatan berjumlah 3.628. Adapun

dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) seluruh Program dan Kegiatan konsisten dengan RKPD. Sehingga, realisasi capaian kinerja sasaran strategis 1.c sebesar 100%. Hal ini karena dalam penyusunan rencana tahun 2020 sudah menggunakan

aplikasi E-RKPD untuk perencanaan serta aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (SIPPKD) untuk keuangan sehingga tidak dimungkinkan OPD memilih kegiatan diluar menu kegiatan yang sudah diinput di sistem informasi.

Adapun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan sasaran 1 antrara lain :

- Usulan belum memperhatikan kewenangan Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- Substansi usulan program/ kegiatan belum selaras dengan sasaran dan prioritas Pembangunan Daerah;
- Volume usulan belum disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;
- Data dukung dari usulan program/ kegiatan belum dapat memberikan informasi yang lengkap.

Kedepan, dalam rangka mengoptimalkan peran aktif stakeholder pembangunan kiranya dilakukan sosialisasi tentang mekanisme penyampaian usulan kepada Stakeholder terkait.

2. Sasaran Utama 2 : Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.

Proses implementasi mulai dari perencanaan, monitoring serta evaluasi dimasing-masing sektor yaitu ekonomi, pembangunan manusia dan infrastruktur dalam pembangunan Provinsi Lampung. Indikator kinerja sasaran 2 ini terdapat 3 indikator sasaran yaitu :

1. Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD dengan target kinerja sebesar 100%;
2. Persentase OPD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD dengan target kinerja sebesar 100%;
3. Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai dengan target kinerja sebesar 80%.



Indikator sasaran 2.a

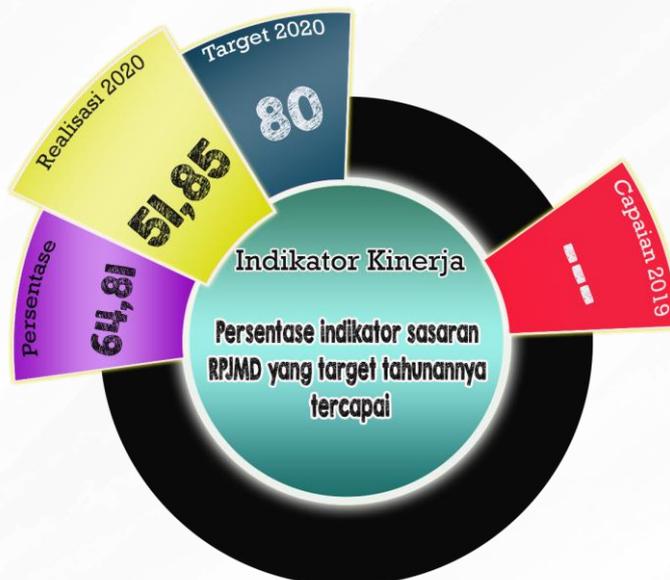
adalah Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD dengan target kinerja sebesar 100%. Adapun realisasi nya adalah sebesar 81,25 % atau dengan persentase terhadap

target sebesar 81,25%. Capaian kinerja diukur berdasarkan hasil evaluasi oleh Kemenpan dan RB RI pada Bulan Agustus Tahun 2020. Dalam hasil evaluasi tersebut terdapat 9 OPD yang belum selaras indikator Renstranya terhadap RPJMD.

Indikator sasaran 2.b

adalah Persentase OPD yang indikator sasaran Renja nya selaras dengan indikator sasaran RKPd dengan target kinerja sebesar 100%. Adapun realisasi nya adalah sebesar 81,25 % atau dengan persentase terhadap target

sebesar 81,25% Capaian kinerja diukur berdasarkan hasil evaluasi oleh Kemenpan dan RB RI pada Bulan Agustus Tahun 2020. Dalam hasil evaluasi tersebut terdapat 9 OPD yang belum selaras indikator Renja nya terhadap RKPd 2021.



Indikator sasaran 2.c

adalah Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai dengan target kinerja sebesar 80% atau sebanyak 27 indikator dari 33 indikator yang ditargetkan mencapai 100%. Adapun realisasi nya sebesar 51,85 %

dengan total indikator yang telah mencapai target berjumlah 14 Indikator sampai dengan Bulan April tahun 2021, sedangkan terdapat 13 indikator

belum mencapai target yang direncanakan Sehingga, realisasi capaian kinerja sasaran strategis 2.c sebesar 64,81%.

Adapun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan sasaran 2 antrara lain :

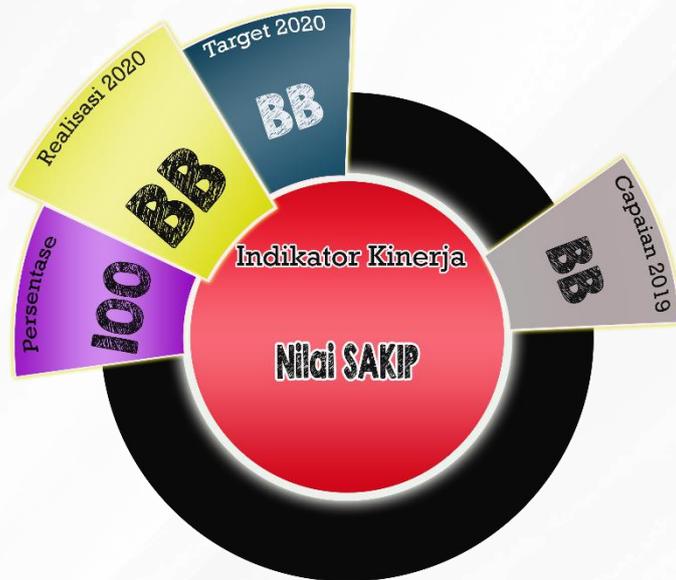
- Belum selaras nya indikator Renstra OPD dengan 33 indikator pada RPJMD 2019-2024;
- Dikarenakan Renstra OPD belum selaras dengan indikator RPJMD 2019-2024, maka hal tersebut berdampak pula dengan RKPD dan Renja OPD yang merupakan rencana tahunan nya;
- Target yang ingin dicapai pada 33 indikator kinerja pada RPJMD 2019-2024 tidak tercapai dikarenakan adanya pandemic Covid-19 sebagai bencana di bidang kesehatan yang berdampak pula pada ekonomi, kesejahteraan masyarakat, keuangan daerah dan capaian target pembangunan daerah.

Untuk menyelesaikan hambatan diatas, maka dilaksanakan tindak lanjut yaitu :

- BAPPEDA dengan didampingi oleh OPD terkait (Inspektorat dan Biro Organisasi) sebagai Leading sektor bagi semua OPD dalam melakukan penyelerasan indikator Renstra harus segera melakukan perbaikan dalam menentukan indikator Renstra yang bersifat **"SMART"**;
- Melakukan penyesuaian pada program/ kegiatan dengan skala prioritas dengan memperhatikan target yang akan dicapai serta menyesuaikan keuangan Daerah.

3. Sasaran Pendukung : Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.

Indikator pendukung ini merupakan indikator rutin yang diukur melalui penyediaan sarana dan prasarana rutin kantor, persentase kehadiran pegawai BAPPEDA dalam 1 tahun, Penyusunan laporan perencanaan, evaluasi, keuangan serta asset. Target



indikator ini merupakan nilai SAKIP yang ingin dicapai pada tahun 2019 yaitu predikat "BB". Adapun realisasi kinerjanya telah mencapai target 100 % karena hasil predikat tersebut akan didapat melalui Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari Inspektorat yang diberikan ke masing-masing OPD pada Bulan Juli Tahun 2020.

3.4 Akuntabilitas Keuangan dan Realisasi Tahun 2020

BAPPEDA Provinsi Lampung tahun 2020 melaksanakan 10 Program dan 61 Kegiatan dalam mendukung target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Bappeda Tahun 2020. Anggaran belanja langsung pada Perubahan APBD sebesar Rp. 12.590.979.950,- yang terbagi dalam Sasaran Utama sebesar Rp. 6.492.003.500,- dan Sasaran Pendukung Rp. 6.098.976.450,- dengan total realisasi keuangan sebesar Rp. 10.251.559.641,-



Gambar 3.1 Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2020

Dari gambar diatas dijelaskan bahwa realisasi kinerja mencapai 97,14% dengan 53 kegiatan yang mencapai 100% dan 8 Kegiatan yang tidak mencapai 100% dengan tingkat persentase paling rendah 50 %.

Untuk 4 Sasaran Utama terdiri 6 program dan 34 kegiatan dengan total anggaran Rp. 6.492.003.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.051.415.770,- dan 1 Sasaran Pendukung terdiri dari 4 program 27 kegiatan dengan total anggaran Rp. 6.098.976.450,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.200.143.871,-. Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif sangat baik. Pencapaian sasaran yang baik jika dibandingkan penyerapan anggaran yang tidak sampai 100% dikarenakan adanya realokasi dan refocussing APBD sebagai dampak Covid-19.

Tabel 3.4 Pagu dan Realisasi Anggaran BAPPEDA Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)		
SASARAN UTAMA								
1.	Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah.	Penetapan RKPD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100	854.675.000	635.425.500	74,35
		Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD.	30%	29,45%	98,16%			
		Persentase Konsistensi Program/ Kegiatan RKPD dengan Program/ Kegiatan KUA PPAS	100%	100%	100%			
2.	Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD	100	81,25	81,25	5.637.328.500	4.415.990.270	78,33
		Persentase OPD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD	100	81,25	81,25			
		Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai	80	30,3	37,87			
SASARAN PENDUKUNG								
1.	Meningkatnya kapasitas dan kinerja instansi BAPPEDA	Nilai SAKIP	BB	BB	100	6.098.976.450	5.200.143.871	85,26
TOTAL						12.590.979.950	10.251.559.641	81,42

Pada tabel diatas dapat dilihat pada Sasaran Utama tingkat realisasi anggaran tertinggi ada pada Sasaran Pendukung yaitu 85,26%, Sedangkan tingkat realisasi anggaran terendah ada pada Sasaran ke-1

yaitu 74,35%. Untuk lebih rinci, berikut ditampilkan anggaran per sasaran nya.

1. Sasaran Utama 1 : Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah

Sesuai dengan diagram disamping untuk sasaran ke 1 pagu anggaran yang direncanakan semula sebesar Rp. 854.675.000,- dengan realisasi anggaran hingga Bulan November sebesar Rp. 583.298.700,-. Program pada Sasaran Utama I terdiri dari 5 Kegiatan dengan realisasi kinerja sebagai berikut :



I. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Jumlah dokumen RKPD Murni dan RKPD Perubahan dengan tingkat capaian 100 %;
2. Jumlah dokumen KUA/ PPAS murni dan perubahan dengan tingkat capaian 100%;
3. Jumlah OPD yang dibina terkait perencanaan dengan tingkat capaian 100%;
4. Jumlah Pelaksanaan Forum Gabungan OPD dan Musrenbang dengan tingkat capaian 100%;



5. Jumlah laporan Hasil Koordinasi terkait isu permasalahan dan indikator sosial ekonomi pembangunan di Provinsi Lampung dengan tingkat capaian 100%.

2. Sasaran Utama 2 : Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.

Sesuai dengan diagram disamping untuk sasaran ke 2 pagu anggaran yang direncanakan semula sebesar

Rp. 5.637.328.500,-

dengan realisasi

anggaran sebesar

Rp. 4.415.990.270,-.

Program pada Sasaran Utama 2

terdiri dari 29 Kegiatan dengan realisasi

kinerja sebagai berikut :



I. Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Ekonomi

1. Jumlah Dokumen hasil FGD di sektor pertanian, pangan, kelautan dan perikanan dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah Buku Statistik Perekonomian (Triwulan dan Tahunan) dan Dokumen hasil FGD di sektor penanaman modal, tenaga kerja, transmigrasi, dan keuangan dengan tingkat capaian 100%;
3. Jumlah Dokumen Maket Intellegen dan hasil FGD di sektor koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, perindustrian, dan perdagangan dengan tingkat capaian 50%;
4. Jumlah Laporan hasil koordinasi Kartu Petani Berjaya (KPB) dengan tingkat capaian 100%;

5. Jumlah Dokumen Laporan Monev dan capaian kinerja di sektor pertanian, pangan, kelautan dan perikanan dengan tingkat capaian 100%;
6. Jumlah Dokumen Laporan Monev dan capaian kinerja di sektor penanaman modal, tenaga kerja, transmigrasi, dan keuangan dengan tingkat capaian 100%;
7. Jumlah Dokumen Laporan Monev dan capaian kinerja di sektor koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, perindustrian, dan perdagangan dengan tingkat capaian 100%.

II. Program Perencanaan Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

1. Jumlah Dokumen Roadmap IPM dan Dokumen Proceeding FGD di sektor Pembangunan Sumberdaya Manusia dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah Dokumen RAD PG 2020-2024 dan Dokumen Proceeding FGD di Sektor Kesejahteraan Rakyat dengan tingkat capaian 100%;
3. Jumlah Dokumen Proceeding FGD di sektor Pemerintahan dengan tingkat capaian 100%;
4. Jumlah desa yang difasilitasi sebagai Pilot Project "Smart Village" dengan tingkat capaian 100%;
5. Jumlah Dokumen pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di sektor pendidikan dan kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan, kearsipan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan tingkat capaian 100%;

6. Jumlah Dokumen LP2KD, Dokumen Laporan Germas, dan Laporan RAD PG 2020-2024 dengan tingkat capaian 66,67%;
7. Jumlah Dokumen Laporan capaian TPB/ SDG's Tahun 2019 dan Dokumen RAD TPB/ SDG's Tahun 2020-2024 dengan tingkat capaian 100%;

III. Program Perencanaan Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

1. Jumlah laporan koordinasi dan dokumen analisis kebijakan di sektor pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, energi dan sumberdaya mineral, dan penelitian dan pengembangan dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah draft dokumen laporan kebijakan KLHS untuk Kawasan Strategis Provinsi yang terdapat di Revisi RTRW Provinsi Lampung dengan tingkat capaian 100%;
3. Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum dan Dokumen laporan hasil kajian kebijakan di sektor perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, kominfo, persandian dan statistik, dan perencanaan dengan tingkat capaian 50%;
4. Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi program unggulan OPD di sektor pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, energi dan sumberdaya mineral, dan penelitian dan pengembangan dengan tingkat capaian 100%;
5. Jumlah Dokumen Laporan hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan penurunan Emisi GRK Provinsi Lampung untuk sektor lahan, limbah dan energi dengan tingkat capaian 100%;

6. Jumlah Dokumen Laporan hasil monitoring dan evaluasi di sektor perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, komunikasi dan informatika, persandian dan statistik, dan perencanaan dengan tingkat capaian 100%;
7. Jumlah Dokumen Laporan hasil koordinasi pelaksanaan program IPDMIP yang jadi kewenangan Bappeda Provinsi Lampung dengan tingkat capaian 100%;

IV. Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Kabupaten/Kota

1. Jumlah buku laporan pelaksanaan program dan kegiatan APBD yang dimonitoring dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah dokumen evaluasi RKPD Tahun 2020 dengan tingkat capaian 100%;
3. Jumlah Dokumen hasil fasilitasi Musrenbang Kab/ Kota, Dokumen hasil fasilitasi RKPD dan RKPD Perubahan Kab/ Kota dengan tingkat capaian 100%;
4. Jumlah laporan Dekon/ TP/ DAK dan laporan monitoring dengan tingkat capaian 100%.

V. Program Pengolahan dan Analisis data Perencanaan

1. Jumlah informasi Geospasial Tematik dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah layanan pengelolaan bahan pustaka E-Book dengan tingkat capaian 100%;
3. Jumlah keterisian E-Database dan Siskurtanas dengan tingkat capaian 92,50%;
4. Jumlah Upload informasi Portal Satu Data Provinsi Lampung dengan tingkat capaian 100%;

3. Sasaran Pendukung : Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.

Sesuai dengan diagram disamping untuk sasaran pendukung pagu anggaran yang direncanakan semula sebesar Rp. 6.098.976.450,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.200.143.871, Program pada Sasaran Pendukung terdiri dari 27 Kegiatan dengan realisasi kinerja sebagai berikut :



I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Jumlah layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah layanan administrasi keuangan dengan tingkat capaian 100%;
3. Jumlah layanan kebersihan kantor dengan tingkat capaian 100%;
4. Jumlah layanan perbaikan peralatan kerja dengan tingkat capaian 100%;
5. Jumlah layanan pengadaan ATK dengan tingkat capaian 100%;
6. Jumlah layanan barang cetak dan penggandaan dengan tingkat capaian 100%;

7. Jumlah layanan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan tingkat capaian 100%;
8. Jumlah layanan penyediaan peralatan rumah tangga dan peralatan listrik dengan tingkat capaian 100%;
9. Jumlah layanan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan tingkat capaian 100%;
10. Jumlah layanan makan minum dengan tingkat capaian 100%;
11. Jumlah koordinasi dan konsultasi dengan tingkat capaian dengan tingkat capaian 89,50%;
12. Jumlah tenaga keamanan yang gajinya terbayarkan dengan tingkat capaian 100%;
13. Jumlah tenaga PTHL yang gajinya terbayarkan dengan tingkat capaian 100%.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan tingkat capaian 100 %;
2. Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan tingkat capaian 100 %;
3. Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan tingkat capaian 100 %;
4. Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan tingkat capaian 94,12 %;

5. Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor dengan tingkat capaian 100 %.



III. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah

1. Jumlah ASN yang mengikuti bimtek, dan sosialisasi dengan tingkat capaian 86,67 %.
2. Persentase capaian kinerja dan kehadiran bulanan dengan tingkat capaian 97,92%;
3. Jumlah pelayanan informasi publik dengan tingkat capaian 100 %;
4. Jumlah pengadaan pakaian dinas Pegawai Bappeda dengan tingkat capaian 98,00 %.

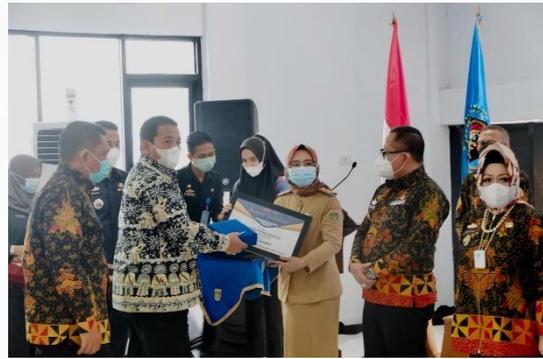
IV. Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah

1. Jumlah dokumen pelaporan dan evaluasi kinerja (LKj, Ev. Renja, Ev. Rencana Aksi, Ev. Renstra, LPPD/LKPJ) dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah dokumen pelaporan capaian keuangan OPD dengan tingkat capaian 100%;
3. Jumlah dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Rencana Aksi) dengan tingkat capaian 100 %;
4. Jumlah arsip digital dokumen perencanaan Bappeda dengan tingkat capaian 100 %;

5. Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan pengelolaan asset dengan tingkat capaian 100 %.

3.5 Prestasi BAPPEDA yang Diraih Selama Tahun 2020

- a. BAPPEDA tahun 2021 meraih Penghargaan Tjindarboemi sebagai Instansi Inovatif Tahun 2020 dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung;



- b. BAPPEDA Provinsi Lampung pada tahun 2020 mendapatkan Peringkat 2 (Dua) Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 untuk Kategori Organisasi Perangkat Daerah dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung;



- c. BAPPEDA tahun 2020 menjuarai peringkat 3 dalam Lomba Media Sosial tingkat OPD Provinsi Lampung yang dilaksanakan pada tahun 2020.



Bab IV. Penutup

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan keterangan capaian kinerja dan keuangan yang telah diuraikan dalam Bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bab IV. Berisi :

1. Rekomendasi;
2. Kesimpulan

- Capaian Sasaran 1 yang terdiri 3 indikator mempunyai capaian rata-rata sebesar 99,38% dengan persentase realisasi keuangan sebesar 74,35 %;
- Capaian Sasaran 2 yang terdiri 3 indikator mempunyai capaian rata-rata sebesar 73,39% dengan persentase realisasi keuangan sebesar 78,33%;
- Capaian Sasaran 3 (pendukung) terdiri 1 indikator mempunyai capaian rata-rata sebesar 100% dengan persentase realisasi keuangan sebesar 85,26%.

4.2 Rekomendasi Berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2020

1. BAPPEDA dengan didampingi oleh OPD terkait (Inspektorat dan Biro Organisasi) sebagai Leading sektor bagi semua OPD dalam melakukan penyelerasan indikator Renstra harus segera melakukan perbaikan dalam menentukan indikator Renstra yang bersifat **"SMART"**;
2. Melakukan penyesuaian pada program/ kegiatan dengan skala prioritas dengan memperhatikan target yang akan dicapai serta menyesuaikan keuangan Daerah;
3. Dalam rangka mengoptimalkan capaian target dari pelaksanaan program/kegiatan maka setiap pengelola kegiatan harus

mengacu pada Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), serta Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dan Rencana Arus Kas (RAK) yang telah disusun, sekaligus mensosialisakannya kepada seluruh anggota personil Tim Kerja Pelaksana Kegiatan;

4. Mengingat bahwa pengukuran kinerja dilaksanakan secara berkala setiap triwulan, maka para pengelola kegiatan diharapkan pula dapat merancang rencana capaian target secara triwulanan;
5. Penetapan indikator dan target dari masing-masing program/kegiatan merupakan *baseline* dalam penetapan Perjanjian Kinerja bagi ASN. Oleh karenanya, konsistensi antara indikator dan target program/kegiatan dengan Perjanjian Kinerja ASN merupakan hal yang penting;
6. Dalam rangka mendukung kelancaran operasional pelaksanaan kegiatan, pengelola kegiatan juga diminta untuk dapat menyampaikan berkas laporan administrasi penatausahaan keuangan secara disiplin (lengkap, akurat dan tepat waktu);
7. Ditengah kondisi pandemic Covid-19 yang belum berakhir dan kondisi keuangan daerah yang belum stabil, pengelola kegiatan perlu senantiasa memperkuat kemampuan manajerial dan kemampuan teknis; sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, dan substantif.

Demikian Dokumen Laporan Kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2020 ini dibuat, dengan harapan dapat menjadi bahan rujukan yang bermanfaat, guna peningkatan BAPPEDA Provinsi Lampung maupun untuk pertimbangan perumusan kebijakan dan program yang lebih terarah dan terpadu pada tahun anggaran yang akan datang.



Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Ir. MULYADI IRSAN, M.T.**

Jabatan : **KEPALA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. ARINAL DJUNAIIDI**

Jabatan : **GUBERNUR LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2021

Pihak Kedua,
GUBERNUR LAMPUNG,

Pihak Pertama,
KEPALA BAPPEDA
PROVINSI LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIIDI

Ir. MULYADI IRSAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19670517 199303 1 011

LAMPIRAN I APBD

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah.	Penetapan RKPD Tepat Waktu;	Tepat Waktu
		Persentase usulan <i>stakeholders</i> yang diakomodir dalam RKPD;	30%
		Persentase Konsistensi Program/ Kegiatan RKPD dengan Program/ Kegiatan KUA PPAS.	100%
1.1	Meningkatnya kualitas data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang sesuai peraturan perundang-undangan	Tingkat kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	100%
2.	Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	Persentase OPD yang indikator sasaran Renstra-nya selaras dengan indikator sasaran RPJMD;	100%
		Persentase OPD yang indikator sasaran Renja nya selaras dengan indikator sasaran RKPD;	100%
		Persentase target indikator sasaran RPJMD yang tercapai.	85%
2.1	Meningkatnya keselarasan perencanaan dan capaian kinerja pembangunan antara RKPD dengan RPJMD.	Tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	100%
2.2	Meningkatnya layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%

<u>Program/ Kegiatan</u>	<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Keterangan</u>
1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.545.497.400	APBD
• Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.087.946.500	APBD
• Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	836.126.000	APBD
• Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	621.424.900	APBD
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4.337.148.100	APBD
• Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.413.505.500	APBD
• Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1.071.472.600	APBD
• Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.852.170.000	APBD
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.848.419.682	APBD
• Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	341.892.000	APBD
• Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.035.221.132	APBD
• Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	295.322.600	APBD
• Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.152.399.600	APBD
• Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	129.213.000	APBD
• Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.012.917.000	APBD

<u>Program/ Kegiatan</u>	<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Keterangan</u>
<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 	881.454.350	APBD
Jumlah	30.731.065.182	

Telukbetung, Januari 2021

Pihak Kedua,
GUBERNUR LAMPUNG,

Pihak Pertama,
**KEPALA BAPPEDA
PROVINSI LAMPUNG,**

ARINAL DJUNAI

Ir. MULYADI IRSAN, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670517 199303 1 011

LAMPIRAN II APBN**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersusunnya dokumen hasil fasilitasi dan koordinasi terkait Dekonsentrasi Bappeda Provinsi Lampung	Jumlah dokumen hasil fasilitasi dan koordinasi terkait Dekonsentrasi Bappeda Provinsi Lampung	1 Dokumen
2.	Tersusunnya dokumen hasil koordinasi terkait hubungan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi terkait hubungan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Daerah	1 Dokumen

<u>Program/ Kegiatan</u>	<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Keterangan</u>
1. Program Perencanaan Pembangunan Nasional	1.111.434.000	APBN
• Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang	1.111.434.000	APBN
2. Program Kapasitas Pemerintah Daerah dan Desa	330.000.000	APBN
• Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah	330.000.000	APBN
Jumlah	1.441.434.000	

Telukbetung, Januari 2021

Pihak Kedua,
GUBERNUR LAMPUNG,Pihak Pertama,
**KEPALA BAPPEDA
PROVINSI LAMPUNG,****ARINAL DJUNAIDI****Ir. MULYADI IRSAN, M.T**
Pembina Utama Madya
NIP. 19670517 199303 1 011

**CASCADING RENSTRA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2020-2024**

RPJMD										RENSTRA BAPPEDA 2019-2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN					SASARAN					PROGRAM					KEGIATAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
							INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AWAL	TARGET TH KE 1	FORMULA	SATUAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	SATUAN	TARGET					NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA	TARGET KINERJA					NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
															2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2	Mengajukan "Good Governance" untuk Meningkatkan Kualitas dan Perencanaan Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Nilai Reformasi Berbasis	A	Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan pelayanan kinerja	Nilai SAKIP	Peningkatan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkelanjutan (energi, pemukiman dan lingkungan) pencanangan badan pembangunan daerah.	n/a	12	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

